

Menyiasati Peluang

Menjadi Videografer (15)

GERAKAN kamera juga dapat berfungsi sebagai Approximate POV didefinisikan sebagai gambar yang dilihat di layar adalah representasi dari gambar yang dilihat oleh karakter yang tidak menempati posisi yang tepat dari yang dikatakan karakter atau merupakan visualisasi perkiraan dari Optical POV karakter. Misalnya serangkaian bidikan dengan menggunakan Approximate POV dari Indoraptor dengan posisi kamera lebih tinggi dari manusia dalam film Jurassic World (Universal Pictures, Legendary Pictures, Amblin Entertainment, The Kennedy/Marshall Company, 2015).

Invoked POV adalah bidikan kamera yang menghadirkan pengamat yang tidak diketahui namanya, tetapi telah ditentukan di depan atau ditentukan sebelumnya. Misalnya Invoked POV dari pengamat yang tidak diketahui namanya pada REY dalam film Star Wars: The Rise of Skywalker (Walt Disney Studios Motion Pictures, Lucasfilm Ltd., Bad Robot Productions, 2019).

Projected POINT OF VIEW adalah kamera bergerak yang seolah-olah melebar dari sudut pandang karakter yang ditugaskan, mendekati sudut pandang seorang pengamat bergerak. Projected POINT OF VIEW mengembara ke arah sekilas dengan memperluas sudut pandang pengamat dan menutup kesenjangan yang memisahkan sudut pandang pengamat dari objek. Projected POINT OF VIEW juga akan terpengaruh oleh kecepatan gerakan, yang dapat membawa implikasi psikologis: Jika kamera bergerak cepat menuju obyek mungkin menunjukkan bahwa karakter dalam mengambil informasi baru dengan terkejut, jika bergerak perlahan menuju obyek itu mungkin menunjukkan niat pengintaian. Sebagai contoh Projected POINT OF VIEW dari film Aladdin (Walt Disney Pictures, Lin Pictures, Rideback, Marc Platt Productions, 2019), kamera bergerak yang seolah-olah dari GENIE melebar mendekati sudut pandang seorang pengamat yang bergerak.

Cara lain, untuk menangkap subtext adalah menggunakan gerakan kamera yang membuat benak penonton mengenang satu momen yang menonjol. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan A Long Take atau Oner atau Continuous Take atau Continuous shot. A Long Take adalah bidikan untuk menampilkan pengambilan tunggal, yang bertahan lebih lama tanpa gangguan dalam pengeditan akhir suatu proyek film. A Long Take biasanya digunakan untuk pergerakan kamera dan pemblokiran yang rumit, sering kali merupakan elemen dalam waktu lama, Meskipun demikian tidak selalu pergerakan kamera dan pemblokiran yang rumit menggunakan A Long Take.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam A Long Take agar dapat menangkap subtext meliputi karakter, setting dan alur cerita. Misalnya film Dunkirk (Warner Bros. Pictures Inc., Sysncopy 2017) yang menggunakan A LONG Take terhadap karakter TOMMY, seorang tentara muda Inggris, satu-satunya yang selamat dari serangan Jerman.

Prof Dr M Suyanto, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta

KEMENDIKBUD MASUK TOP 46

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

JAKARTA (KR) - Kemendikbud meraih penghargaan Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kategori Instansi Pemerintah 2020. Kompetisi ini diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kompetisi ini terdiri 30 instansi.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim di Jakarta, Selasa (12/1) mengatakan, pihaknya berkomitmen berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya, di sektor pendidikan dan kebudayaan. Pengelolaan pengaduan masyarakat ini juga merupakan pendorong perubahan. Ia berharap dapat berdampak pada kualitas serta perbaikan layanan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, dalam menangan-

ni pengaduan, bukan hanya mengelola keluhan dari masyarakat, namun juga bagaimana mengelola layanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita fokus pada kualitas layanan kepada masyarakat," terang Ainun melalui keterangan tertulisnya.

Ainun menambahkan, pelayanan publik Kemendikbud tersebar di 34 provinsi. Masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau keluhan, dapat melalui unit layanan

yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kompetisi yang sudah diselenggarakan ketiga kalinya ini bertujuan menjangkau, mendokumentasikan, mendiseminasikan dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ini jadi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Selain itu, juga untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang ideal, sekaligus memberikan penghargaan kepada instansi yang telah mengelola pengaduan dengan baik," ujar Diah.

Total peserta Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 mencapai 439 instansi.

Peserta terdiri 237 Instansi Pemerintah (IP) dan 202 Unit Pengelola Pelayanan (UPP). Kriteria dalam kompetisi ini adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya enam bulan pada saat pengumuman pendaftaran kompetisi, tepatnya Agustus 2020.

Sebelumnya, Kemendikbud juga meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori 'Menuju Informatif' dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pemberian penghargaan kepada Kemendikbud ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. **(Ati)-d**

STIERA Bantu Atasi Persoalan UMKM



KR - Jarot Sarwosambodo
Kerja sama STIE Rajawali-Pemkab Purworejo ditandai penyerahan kenang-kenangan.

PURWOREJO (KR) - STIE Rajawali (STIERA) Purworejo menerjunkan 61 mahasiswa untuk membantu mengatasi persoalan UMKM di kabupaten setempat. STIE ini menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (KUKMP) Purworejo sebelum menyebarkan puluhan mahasiswanya ke 16 kecamatan di Purworejo.

Kerja sama tersebut ditan-datangani Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Rajawali Hesti Respatining-sih SE MPar dan Kepala Dinas KUKMP Purworejo Bambang Susilo di aula STIE. "Kami menjalin kerja sama untuk memudahkan langkah kampus dalam berkontribusi membina UMKM di Purworejo," ungkap Ketua

STIE Rajawali Anna Probo-wati SE MM MPar kepada KR, usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama.

Mahasiswa akan praktik pada pelaku usaha yang tergabung dalam forum UMKM di 16 belas kecamatan. Mereka membantu dan memberi masukan kepada UMKM dalam menyelesaikan berbagai kendala bidang produksi dan pemasaran yang dihadapi pelaku usaha.

Menurut Anna, diterjunkannya mahasiswa ini, merupakan hal baru bagi STIE Rajawali. Sebelum pandemi, STIE itu memberangkatkan mahasiswa tingkat akhir untuk magang di berbagai perusahaan luar daerah. "Namun ada hikmah di tengah pandemi ini, yakni kita bisa berkontribusi lebih besar dalam mengembangkan SDM UMKM di Purworejo," tuturnya. **(Jas)-d**

1.444 Mahasiswa UNS KKN di Jawa/Luar Jawa

SOLO (KR) - Sebanyak 1.444 peserra Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (12/1), mulai diterjunkan di 106 kabupaten di Jawa dan 24 kabupaten di luar Jawa. Ini adalah KKN yang ketiga di masa pandemi Covid 19.

Dalam masa pandemi ini, UNS tidak ingin hanya berdiam, namun harus berinovasi dan berkarya. "Masyarakat menunggu ide-ide inovatif yang dibutuhkan dari para mahasiswa," tandas Rektor UNS, Prof Dr Jamal Wiwoho.

Dari 1.444 mahasiswa KKN itu, secara resmi dilepas Wakil Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi, Budi Ari Setiadi MSi secara virtual. Ia sependapat dengan rektor, melalui KKN mahasiswa bisa menyalurkan inovasi yang ditemuk-

kan. "Ketika berada berada di desa mahasiswa harus bisa memberikan inovasi dan solusi yang bisa diterima masyarakat," kata Budi.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa ke desa merupakan sumber energi bagi masyarakat untuk pembangunan desa. Melalui energi itu desa bisa melakukan perobahan. Budi menyebutkan, desa digital dan desa wisata terus dikembangkan.

Sementara Ketua LPPM Prof Dr Okid Parama Astirin menambahkan, mahasiswa KKN yang diterjunkan didampingi 70 dosen pembimbing lapangan. Mereka berada dalam periode Januari- Februari masing masing dibekali dana Rp 850 ribu. **(Qom)-d**

EKONOMI

IPO Bank Net Indonesia Syariah

JAKARTA (KR) - PT Bank Net Indonesia Syariah tengah bersiap untuk melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan saham perdana dijadwalkan pada tanggal 2 Februari 2021. "Proses bookbuilding dilakukan mulai dari tanggal 11 Januari 2021 sampai 18 Januari 2021. Adapun seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja perseroan," kata Direktur PT Bank Net Indonesia Syariah Basuki Hidayat di Jakarta, Selasa (12/1).

Dikatakan, nantinya keseluruhan dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya dan modal kerja lainnya, hal ini sejalan dengan rencana strategis bank yang akan bertransformasi menjadi bank digital.

Bank Net Indonesia Syariah berencana melepaskan saham sebanyak-banyaknya 5 miliar lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100. Setiap saham yang mewakili 37,90 persen dari modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam proses bookbuilding perseroan menetapkan range harga Penawaran Umum pada kisaran Rp 103, hingga Rp 105, sehingga dana yang diperoleh berkisar Rp 515 miliar hingga Rp 525 miliar.

Selain mencatatkan sahamnya, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 2, 8 miliar lembar atau sebesar 34,175% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pendaftaran. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru perseroan dengan perbandingan 25 Saham Baru mendapatkan 14 (empat belas) Waran Seri I. **(Lmg)-d**

Digitalisasi, UMKM Segera Naik Kelas

JAKARTA (KR) - Pengguna Quick Response Indonesia Standard (QRIS) selama 2020 mencapai 5,8 juta pengguna, yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun 2021 ini target dua kali lipat menjadi 12 juta pengguna QRIS.

Demikian disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia secara virtual, Senin (11/1). "Para perbankan mari kita tingkatkan 2 kali lipat jadi 12 juta sehingga merchant, sebagian besar UMKM, tersambung secara nasional menjadi merchant digital banking, teknologi finansial (tekfin), dan memudahkan transaksi pembayaran," ujarnya.

Perry mengharapkan dengan digitalisasi yang semakin cepat, UMKM akan menjadi sangat terbantu. Tidak hanya dari sisi sistem pembayaran, UMKM diyakini juga akan naik kelas, bahkan dapat menjadi daya dukung perekonomian nasional. "Saya yakin dengan digitalisasi, UMKM akan naik kelas, go digital, go ekspor, dan jadi daya dukung penggerak ekonomi kita," tuturnya.

Melalui Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia ini, BI pun berkomitmen akan terus memberikan pendampingan bagi UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan khususnya melalui media digital. **(Lmg)-d**

DAMPAK PEMBATAAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL

Pusat Perbelanjaan di DIY Alami Tekanan Bisnis

YOGYA (KR) - Beberapa pusat perbelanjaan atau mal khususnya di Kota Yogyakarta dan Sleman mengalami tekanan bisnis alias penurunan transaksi penjualan dengan diberlakukannya kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY sejak 11 hingga 25 Januari 2021.

Pusat perbelanjaan dan mal harus melaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas kegiatan restoran sebesar 25 persen makan di tempat dan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 selama dua pekan ke depan.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY Surya Ananta mengungkapkan, para pengelola mal yang ada di DIY khususnya di Sleman dan Kota Yogyakarta pada prinsipnya menjalankan kebijakan PTKM tersebut. Sebab tujuan diberlakukannya PTKM ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran sekaligus membatasi ruang gerak agar tidak terjadi penularan virus Korona lebih luas.

"Kami mendukung kebijakan

PTKM tersebut dan kami telah menginformasikan seluruh tenant untuk pembatasan jam operasional mal mulai 10.00 hingga 19.00 sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Semuanya harus menyesuaikan pembatasan jam operasional tersebut, ditambah pembatasan kapasitas kegiatan restoran hanya 25 persen yang diperkenankan makan/minum di tempat dan layanan pesan antar dilayani sesuai jam operasional restoran," tutur Surya kepada KR di Yogyakarta, Selasa (12/1).

Di samping penyesuaian jam operasional, pihaknya telah berusaha seoptimal mungkin meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai sejak awal

pandemi. Dengan adanya pembatasan baik operasional maupun kapasitas tersebut, otomatis berdampak turunnya transaksi penjualan yang sebelumnya sudah tertekan sejak awal pandemi. Apalagi pusat perbelanjaan di DIY saat ini banyak menjadi tempat pilihan makan atau wisata kuliner masyarakat sehingga pembatasan tersebut jelas menekan bisnis.

"Kami sebenarnya prihatin dan menyayangkan dengan adanya kebijakan pembatasan karena secara bisnis akan mempengaruhi penurunan transaksi penjualan. Untuk itu, kami benar-benar berusaha agar kebijakan PTKM kali ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak sehingga tidak ada lagi kebijakan pengetatan atau pembatasan yang diberlakukan supaya aktivitas perekonomian segera pulih seiring peningkatan kesehatan," terangnya.

General Manager Plaza Ambarukmo tersebut menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah pelaku UMKM karena yang menjadi tenant di mal tidak hanya berskala na-

sional dan internasional semata. Untuk itu, kebijakan pembatasan ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya seoptimal mungkin agar bisa membantu memutus mata rantai penyebaran virus Korona yang kuncinya melalui pembatasan pergerakan orang. Jumlah pengunjung di Plaza Ambarukmo saja belum pulih atau masih di bawah 50 persen sejak pandemi dan akan drop lebih signifikan lagi jika pengetatan dan pembatasan terus dilakukan.

"Kami tidak ingin itu terjadi, sehingga kami sangat berharap semua pihak untuk benar-benar melaksanakan kebijakan PTKM tersebut dengan penuh kesadaran dan disiplin supaya efektif sehingga tidak ada perpanjangan pembatasan atau pengetatan lagi. Kami minta agar koordinasi pemerintah khususnya dengan pengelola pusat perbelanjaan lebih ditingkatkan lagi supaya problematika perekonomian dalam jangka panjang tidak semakin mengkhawatirkan daripada permasalahan kesehatan," pungkas Surya. **(Ira)-d**

PT WMU Siap Melantai di Bursa Saham

JAKARTA (KR) - PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) akan melakukan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO). Perseroan melepas sebanyak-banyaknya 5.923.076.900 saham baru ke publik setara dengan sebanyak-banyaknya 35 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan menawarkan harga IPO berkisar antara Rp 142 sampai Rp 200.

Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, WMU melakukan penjatahan saham melalui program alokasi saham pegawai atau Employee Stock Allocation (ESA). Dalam program ini, Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 7,5 persen dari jumlah saham IPO. Selain itu, Perseroan juga memberikan opsi kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) sebanyak-banyaknya 1 persen dari portepel IPO.

Direktur Utama WMU Ali Mas'adi mengaku akan menggunakan dana IPO sebesar 74,3 persen untuk ekspansi dengan menambah serta memperluas sarana produksi. Antara lain untuk pembangunan fasilitas Breeding Parent Stock (PS) Farm atau pembibitan ayam indukan di Gunungkidul DIY, pembangunan fasilitas Layer Commercial Farm di Klaten Jawa Tengah dan sebagainya. Sisa dana IPO sebesar 25,7 persen akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama untuk pembelian bahan baku pada Feedmill dan pembelian ayam broiler komersial untuk Slaughterhouse. **(Ira)-d**

DEKATKAN PENYALURAN BBM AMAN DAN BERKUALITAS

Pemda DIY Minta Pertamina Gandeng BUMDes

YOGYA (KR) - Pemda DIY mengarahkan PT Pertamina (Persero) guna menggandeng BUMDes dalam mengembangkan dan memperluas jaringan Pertashop di DIY. Kerja sama antara kedua belah pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan energi hingga pelosok atau daerah pedesaan yang belum terjangkau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, kehadiran Pertashop di tengah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendekatkan sumber penyaluran energi yang aman dan berkualitas di tengah masyarakat

Pertashop merupakan fasilitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) serupa SPBU dalam bentuk lebih kecil atau mini yang dihadirkan di desa-desa terpencil. Pertashop merupakan satu-satunya lembaga penyalur BBM di pedesaan yang dioperasikan oleh Pertamina secara resmi yang telah memenuhi aspek legal dan aspek keselamatan kerja atau Health, Safety, Security, Environment (HSSE).

Gubernur DIY Sultan Hamengku

Buwono X menyarankan agar Pertamina menjalin kerja sama dengan BUMDes untuk mengembangkan program Pertashop. Melalui program Pertashop ini diharapkan segera terlaksana agar akses masyarakat terhadap BBM lebih luas dan terjangkau.

"Kami minta agar pengembangan program dari Pertamina ini bisa menggandeng dan melibatkan BUMDes di DIY," ujar Executive General Manager Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Sylvia Grace Yuvenna di Kompleks Kepatihan, Senin (11/1).

Dijelaskan, Pertashop merupakan program kemitraan Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non-Subsidi, Elpiji Non-Subsidi dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Pihaknya akan segera melakukan ekspansi penyaluran BBM sesuai arahan Gubernur DIY. "Kami akan menggandeng BUMDes setempat karena pengelolaannya dapat lebih mudah," tandasnya. **(Ira)-d**